

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku. Daerah Istimewa ini sering diidentikkan dengan Kota Yogyakarta. Tempat yang mempunyai berbagai keunikan budaya, kuliner, wisata, dan kota tujuan untuk menimba ilmu. Tidak salah jika Yogyakarta dijuluki kota budaya. Banyak wisatawan dari luar dan dalam negeri berkunjung ke Yogyakarta untuk berwisata. Tidak hanya itu, banyak sekali para pelajar dari luar kota untuk menimba ilmu yang di kota yang kental akan budayanya.

Selain banyak seniman, Yogyakarta banyak mengadakan festival-festival tentang budaya. Sanggar-sanggar budaya yang banyak tersebar di seluruh Yogyakarta, hal ini semakin menguatkan jika Yogyakarta sebagai kota seniman dan budaya. Julukan ini bukan hanya sebagai anugrah tapi juga beban bagi para penduduknya. Bagaimana tidak walaupun tidak di haruskan, tetapi warga Yogyakarta dengan julukan ini mau tidak mau harus mengerti sesuatu tentang seni dan budaya. Akan tetapi julukan ini ikut membesarkan nama Yogyakarta sebagai tempat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun mancanegara.

Kota budaya yang melekat pada Yogyakarta tidak lepas dari Undang- Undang yang mengaturnya, saat ini Keistimewaan DIY diatur dengan UU Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan kelembagaan Pemerintah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas, dan

efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip tanggung jawab. Yogyakarta yang kaya akan budayanya harus memelihara seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Yogyakarta. Dibantu oleh pemerintah yang menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY.

Yogyakarta membutuhkan adanya Pemerintah untuk menunjang pengembangan kotanya. Membuat Yogyakarta lebih dikenal lagi di masyarakat. Tidak terlepas pula Humas Pemerintah Yogyakarta sangat berperan penting menunjang Yogyakarta lebih dikenal oleh masyarakat Yogyakarta maupun luar. Keberadaan Humas sebagai mediator yang menjembatani kepentingan organisasi pemerintah dengan publiknya sehingga berbagai kegiatan senantiasa menjaga dan meningkatkan citra yang positif. Kualitas layanan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahan. Pemerintah dituntut menyediakan informasi dan mengkomunikasikan / mensosialisasikan sesuai dengan keinginan masyarakat Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama pemerintah. Disinilah diperlukan peran Humas Pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Dilihat dari jumlah epidemi HIV/AIDS di Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Riswanto Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jogjakarta. Menurut data dari KPA Yogyakarta sejak tahun 1993 hingga 2013 ada 2288 pengidap virus HIV/AIDS di Yogyakarta. Jumlah tersebut terdiri dari 1323 pengidap HIV dan 965 pengidap AIDS. Angka ini meningkat dari tahun 2012 sebanyak 347 orang dengan rincian 213 mengidap HIV dan 134 mengidap AIDS. ([http://www.tempo.co/read/news/2013/10/24/058524408/ Pola-Penularan-HIVAIDS-di-Yogya-Berubah](http://www.tempo.co/read/news/2013/10/24/058524408/Pola-Penularan-HIVAIDS-di-Yogya-Berubah)) diakses 16 Maret 2015 jam 20.00 WIB.

Dilihat dari data diatas jumlah pengidap HIV/AIDS mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 1993 sampai 2013 jumlah penduduk di Yogyakarta selalu meningkat bukannya berkurang. Hal ini diperlukan tindakan tegas dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah bertambahnya penduduk yang terkena HIV/AIDS.

Usaha pemerintah daerah dalam memberantas korupsi juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008. Meskipun Yogyakarta dalam tahun 2010 masuk dalam peringkat lima tertinggi, dengan urutan pertama adalah Denpasar skor 6,71, Tegal skor 6,26, Solo skor 6, kemudian Yogyakarta skor 5,81, Manokwari skor 5,81. (<http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/tii-korupsi-di-jogja-meningkat-29835.html>) diakses pada tanggal 20 april 2015 jam 11.00 WIB.

Data diatas memperlihatkan peningkatan HIV/AIDS dan penurunan pemberantasan korupsi di Yogyakarta, Humas Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki cara untuk mengkomunikasikan / mensosialisasikan Program Kesehatan dan Anti-Korupsi melalui pertunjukan budaya lokal karena Yogyakarta masih sangat kental dengan kebudayanya dan masih jarang digunakan oleh Pemerintahan lain. Tidak hanya itu Program Kesehatan juga dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kawasan yang bebas asap rokok yaitu tempat umum. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng kelompok kesenian, dengan menghidupkan kembali agenda sosialisasi program pemerintah daerah melalui seni pertunjukan. Pertunjukan sebagai media sosialisasi Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Komunitas Sejo Guruh. Hal ini disampaikan Bapak Ignatius Trihastono selaku Humas Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2014:

“Pemerintahan Kota Yogyakarta berupaya memperbaiki serta memperlancar komunikasi dengan media konvensional dan internet, tetapi tidak semua masyarakat rutin

menggunakan media tersebut. Sehingga Pemerintah Kota memunculkan kembali komunikasi era 90an melalui pertunjukan rakyat dengan menampilkan pentas sandiwara berbahasa Jawa Segu Guruh”

Komunitas Segu Guruh sendiri berdiri tahun 1996 sebagai perkumpulan teater berbahasa Jawa. Komunitas Segu Guruh dikenal menjadi salah satu kelompok teater yang pementasannya selalu berkomitmen dengan menggunakan Bahasa Jawa. Wage Daksinarga pendiri Segu Guruh, Segu guruh adalah komunitas teater yang menggunakan bahasa jawa. Komunitas Segu Guruh memiliki tujuan sederhana yaitu komunitas ini muncul dari rakyat dan untuk rakyat.

Untuk sesi pertama pertunjukan akan digelar di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2013. Pertunjukan teater akan mengambil judul Wedi Karo Bojomu. Sementara sesi kedua di gelar di Sosrowijayan dengan judul Purik dengan judul “Pulangkan Aku ke Rumah Orangtuaku”. Mengkomunikasikan Program Kesehatan melalui pertunjukannya teater dengan Bahasa Jawa, mengenai program yang disosialisasikan tidak hanya ada di dalam cerita tetapi diselipkan juga dalam dialog cerita teaternya.

Mengkomunikasikan Program Kesehatan dan Anti-Korupsi melalui pertunjukan budaya lokal teater bahasa Jawa, konsep sosialisasi yang diwacanakan Bagian Humas Pemerintah Kota Yogyakarta, akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal tersebut mempertimbangkan, dialog yang digunakan kelompoknya setiap pentas adalah Bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibu dari masyarakat Yogyakarta. Konsep pendialogkan program akan lebih mudah di mengerti masyarakat, ketika pembicaraan tidak hanya dilakukan oleh seniman di atas panggung. Dialog juga akan dilakukan secara langsung dengan audiens yang hadir menikmati obrolan dalam pertunjukan budaya teater rakyat tersebut.

Sesi kedua, melihat peningkatan pengidap HIV/AIDS Pemerintahan Kota Yogyakarta berkerjasama dengan komunitas Segu Guruh dengan menampilkan pentas sandiwara berbahasa

Jawa “Purik” dengan mengangkat isu terkini yang diadakan tanggal 14 Desember 2013 di Sosrowijayan dengan judul “Pulangkan Aku ke Rumah Orangtuaku” dengan pesan yang akan disampaikan terkait perilaku sosial, kesehatan. Tempat dan isu yang diambil sangat mendukung satu sama lain, kita ketahui bahwa Pasar Kembang salah satu tempat pekerjaan wanita tunasusila yang sangat rentan dengan penyakit HIV/AIDS. Mereka yang kurang sadar tentang pentingnya kesehatan.

Humas Pemerintah Kota Yogyakarta juga sebarakan pesan antikorupsi dengan mementaskan teater lakon KUP (Kudeta Untuk Pemerintah) Dadu Judi dalam pentas keliling. Pentas sandiwara berbahasa Jawa itu mengangkat permasalahan sosial masyarakat pinggiran yang kurang beruntung. Pertunjukan digelar di kampung-kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Permasalahan sosial pada pesan antikorupsi dilihat dari kehidupan masyarakat sekarang ini yang penuh teror.

Gelaran sandiwara dalam mengkomunikasikan program cukup mendapat apresiasi yang baik dari warga Yogyakarta, selain banyak penonton yang memenuhi tempat yang disediakan panitia, hadir pula para pejabat dan karyawan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

Program Kesehatan dan Anti-Korupsi melalui pertunjukan budaya lokal dalam mengkomunikasikan program pemerintah dapat mendekati diri kepada masyarakat dengan media petunjukan rakyat atau pertunjukan budaya lokal yang diyakini masih efektif untuk dapat diterima oleh masyarakat Yogyakarta. Melibatkan para mahasiswa Yogyakarta terutama mahasiswa ISI jurusan teater yang membantu Humas Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program yang direncanakan. Peneliti juga tertarik untuk mengamati pesan yang

disampaikan dan dibangun Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pentas sandiwara yaitu komunikasi dengan media kesenian karena masyarakat Yogyakarta adalah kota budaya dan seni.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui aktivitas Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengkomunikasikan program kesehatan dan antikorupsi pemerintah melalui pertunjukan budaya lokal. Tidak hanya itu peneliti juga tertarik untuk melihat faktor pendukung dan penghambat aktivitas Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengkomunikasikan Program Kesehatan dan Anti-Korupsi melalui Pertunjukan Budaya Lokal. Program tersebut juga menghidupkan kembali komunikasi era tahun 90an yang masih efektif dengan pertunjukan rakyat melalui teater Bahasa Jawa apalagi masyarakat Yogyakarta masih sangat kental akan budayanya. Pertunjukan teater salah satu cara yang mereka kenal dan sesuai dengan nilai kultural di Yogyakarta sehingga masyarakat tidak sulit untuk memahami isi dari pesan-pesan pertunjukan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Aktivitas Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mengkomunikasikan Program Kesehatan dan Anti-Korupsi melalui Pertunjukan Budaya Lokal?
- b. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat Aktivitas Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mengkomunikasikan Program Kesehatan dan Anti-Korupsi khususnya dengan pertunjukan budaya lokal?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Aktivitas Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengkomunikasikan Program Kesehatan dan Anti-Korupsi khususnya dengan pertunjukan budaya lokal.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Aktivitas Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengkomunikasikan Program Kesehatan dan Anti-Korupsi khususnya dengan pertunjukan budaya lokal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai rekomendasi

dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya dalam Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kantor Humas Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam merumuskan program Aktivitas Humas Pemerintah Yogyakarta dalam mengkomunikasikan program melalui pertunjukan budaya lokal.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman menerapkan konsep-konsep ilmu komunikasi yang sudah dipelajari terlebih dahulu khususnya Praktisi Humas Pemerintah dalam mengkomunikasikan program.

## E. Kajian Teori

### 1.1 Definisi Humas Pemerintah

Humas sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Fungsi manajemen dapat diartikan bahwa manajemen disemua organisasi harus memerhatikan humas. Identifikasi pembentukan dan pemeliharaan hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik sebagai basis moral dan etis dari profesi humas. Definisi ini juga mengemukakan kriteria untuk menentukan apa itu humas dan apa yang bukan humas (Cutlip, 2000:6).

Kegiatan-kegiatan Humas Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya diarahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan timbal balik yang menguntungkan, tidak hanya untuk publik tetapi menjalin hubungan yang baik sangat diperlukan bagi Pemerintah.

Sementara itu beberapa ahli berpendapat mengenai definisi humas diantaranya sebagai berikut:

- a. Humas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh *goodwill*, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra dari masyarakat.
- b. Humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan yang harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra yang positif.
- c. Humas adalah suatu proses yang berhubungan dari usaha manajemen untuk memperoleh *goodwill* dan pengertian dari pelanggan, konsumen, publik pada umumnya termasuk para staf pegawainya. Ke dalam mengadakan perbaikan dan

pembenahan melalui *corporate culture building* berbentuk disiplin, motivasi, meningkatkan pelayanan dan produktivitas kerja yang diharapkan dapat terciptanya *sense of belonging*

terhadap perusahaannya. Sedangkan ke luar, berupaya untuk menciptakan kepercayaan dan citra perusahaan yang sekaligus memayungi serta mempertahankan produknya (Ruslan, 2002:8).

Humas dalam lembaga pemerintahan (departemen, lembaga nondepartemen, Badan Usaha Milik Negara / BUMN) merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat (Rachmadi,2002:77). Di semua negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Termasuk Humas Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kegiatan proses penetapan kebijaksanaan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang atau golongan, agar lembaga / instansi dimana Humas itu berada memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Pelayanan dan sikap yang baik sangat penting demi terciptanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya

Humas pemerintah tidak sekedar membangun dan mempertahankan citra departemen di lingkungannya sendiri tetapi juga harus dapat mencerminkan citra pemerintah serta citra negara dan bangsa di mata masyarakat maupun dunia. Sama halnya Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin karena pelayanan akan mencerminkan citra positif dari pemerintah.

## **1.2 Fungsi Humas Pemerintah**

Fungsi Humas Pemerintah sangat diperlukan dalam suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sam Black (dalam buku Effendy, 1999:37) mengemukakan dua tugas atau fungsi Humas Pemerintah Pusat, yaitu:

1. Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaan, dan hasil yang telah tercapai.
2. Menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari.

Sedangkan untuk Humas Pemerintah daerah ada empat tujuan utama, yaitu:

1. Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga beserta mengenai kebijakan lembaga beserta kegiatan sehari-hari.
2. Memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangan mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil keputusan.
3. Memberi penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka.
4. Mengembangkan rasa bangga sebagai warga Negara,

Menurut pakar humas internasional, Cutlip, Center, dan Canfield (dalam buku Ruslan, 2007: 20-21) fungsi humas dapat dirumuskan sebagai penunjang aktifitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi):

1. Membina hubungan yang harmonis antara badan/ organisasi dengan pihak publiknya, sebagai khalayak sasaran.

2. Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi, tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya.
3. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan managemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama.
4. Menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau terjadi sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

Fungsi Humas Pemerintah Kota Yogyakarta yang berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya akan menunjang keberhasilan aktivitas humas. Aktivitas humas dapat berjalan lancar dengan membina hubungan yang harmonis dan menciptakan komunikasi yang bertujuan mendapatkan citra positif dari publiknya.

Selain itu fungsi humas pemerintah lainnya menurut Edward L Barney (dalam buku Rachmadi, 1992:19) menuliskan fungsi utama dari humas pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penerangan kepada masyarakat
- b. Memberikan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan atau sebaliknya dari keseluruhan fungsi humas di atas, diharapkan dapat mengatasi masalah yang muncul, mencari dan menemukan kepentingan organisasi yang mendasar dan diinformasikan kepada semua pihak secara jujur dan jelas.

### **1.3 Peran Humas Pemerintah**

Tujuan dari humas pemerintah, terlepas dari level dan tipe pemerintahan merangkum tugas-tugas/peran seorang humas pemerintah sebagai berikut:

1. Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintahan.
2. Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah: *voting curbside recycling*, dan juga kepatuhan kepada program aturan – kewajiban menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok.
3. Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan: sensus, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye penyadaran akan kesehatan personal, batuan untuk upaya pertolongan bencana.
4. Melayani sebagai *advokat* publik untuk administrator pemerintah: menyampaikan opini publik, kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik didalam organisasi serta meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat administrasi.
5. Mengelola informasi internal: menyiapkan *newsletter* organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi untuk karyawan.
6. Memfasilitasi hubungan media menjaga hubungan dengan pers lokal; bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberitahu pers tentang organisasi dan praktiknya serta kebijakannya.
7. Membangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik lainnya serta mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan (Cutlip, 2000:466).

Humas pemerintah maupun Humas badan-badan swasta mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan iklim pendapat umum yang menguntungkan. Pendapat umum yang menguntungkan dapat dilakukan dengan cara *lobbying*. Bagi Humas badan usaha

swasta, *lobbying* menjamin kondisi yang menguntungkan dari sebuah industri, kelompok konsumen dan sebagainya. Sedangkan Humas pemerintah, *lobbying* diadakan terutama untuk mendapatkan input bagi bagi pengesahan dari Lembaga Perwakilan Rakyat agar rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah dapat diterima.

Menurut Rosady Ruslan (2007 : 110-111) mengatakan bahwa peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara taktis dalam jangka pendek, Humas instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan maksud dari instansi/ lembaga yang bersangkutan.
2. Secara strategis (jangka panjang) Humas/ PR instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), dalam memberikan sumbang saran, gagasan, dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk menyukseskan program kerja lembaga bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerja sama dan mendapat dukungan masyarakat.

#### **1.4 Aktivitas Humas Pemerintah**

Dalam aktivitas yang dilakukan oleh Humas mempunyai sebuah tujuan yaitu untuk mengukur, menganalisis dan mempengaruhi publik yang berkembang dari sikap individu-individu yang membentuk publik. Publik merupakan kelompok atau orang-orang yang

berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal (Jefkins, 1996:71).

Menurut Sunarto dalam bukunya “Humas Pemerintah dan Komunikasi Persuasif” (2003:45-47) menerangkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, maka humas pemerintah perlu melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut

1. Membina pengertian kepada publik terhadap kebijaksanaan pemerintah. Dalam hal ini, publik yang menjadi sasaran terdiri dari:
  - a. Publik internal yaitu karyawan di lingkungan pemerintah itu sendiri. Bagian humas harus dapat berkerja sama dan berhubungan dengan semua bagian di suatu organisasi. Tanpa pemahaman dan dukungan aktif dari bagian personalia dan bagian industri, maka humas yang efektif tidak mungkin tercapai. Bagian-bagian ini secara bersama-sama berkepentingan dalam mengembangkan hubungan yang baik dengan para karyawan dan bagian humas harus memelihara hubungan terus menerus.
  - b. Publik eksternal yaitu media massa, pejabat pemerintah, pemuka pendapat , dan masyarakat sekitar yang menjadi publiknya. Publik eksternal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan orang- orang diluar lembaga atau instansi sehingga terbentuk opini publik dan citra yang positif terhadap lembaga.
2. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan publik aparatur pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan yang telah *direlease* untuk publiknya.

3. Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat.
4. Mengumpulkan data dan informasi yang datang dari berbagai sumber. Masalah pengumpulan data dan penyimpulan data serta informasi yang menjadi perhatian semua orang. Tidak saja besarnya jumlah informasi, tetapi juga tema menumpukan informasi yang relevan serta diperlukan oleh perorangan, badan atau instansi, media, kantor berita, lembaga pendidikan dan perusahaan yang memerlukan data dan informasi.
5. Melakukan analisa terhadap permasalahan yang telah diklarifikasi ke dalam bidang-bidang permasalahan yang sesuai dengan bidang pekerjaan humas yang bersangkutan, kemudian membuat kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Hasil dari proses pengolahan ini diperlukan untuk memberikan gambaran atau informasi kepada pimpinan dan khalayak.
6. Kegiatan humas merupakan penyampian informasi yang mengandung penjelasan atau fakta pendapat atau sikap yang akan dikomunikasikan. Sifat informasi bersifat macam-macam, yaitu:
  - a. Rahasia atau tidak rahasia
  - b. Nilai aktualitasnya bagi khalayak rendah atau tinggi
  - c. Nilai kebutuhan khalayak yang luas dan terbatas
7. Penyebaran informasi merupakan suatu proses kegiatan humas kepada khalayak internal maupun eksternal. Informasi humas yang akan disebarkan kepada masyarakat pada umumnya harus mengandung jaminan akan validitas dan

kredebilitas informasi yang dikomunikasikan. Penyebaran informasi humas hendaknya disesuaikan dengan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu penyebaran dapat ditinjau dari segi pengelompokan sasaran yang bersifat vertical, misalnya: kelompok cendekiawan, kelompok pendidikan, dan sebagainya.

Humas Pemerintah mengkomunikasikan kebijakannya melalui publik internal dan publik eksternal. Publik eksternal sama pentingnya dengan publik internal karena hubungan humas dengan keduanya sangat menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi meraih sukses dalam kebijakan pemerintah.

## **1.5 Media Publikasi Humas**

Publikasi adalah informasi yang disediakan oleh nara luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita. Metode penempatan pesan di media ini adalah metode yang tak bisa dikontrol sebab sumber informasi tidak memberi bayaran kepada media untuk pemuatan informasi tersebut. Contoh publikasi antara lain:

### **1. Berita**

Berita di rubik finansial tentang peningkatan pendapatan sebuah perusahaan, sebuah foto dan caption tentang pengumuman bisnis baru atau peluncuran produk baru, tulisan orang tentang kemajuan kampanye pengumpulan dana, berita feature dimajalah yang menjelaskan temuan ilmiah baru dari pusat riset kanker, tabloid hiburan yang memuat daftar konser band terfavorit, dan liputan berita televisi tentang pusat pameran baru. Biasanya berita-berita semacam itu berasal dari departement PR sebuah perusahaan, direktur organisasi yang berkaitan dengan sumbangan pembangunan, biro berita universitas, manajer band musik, atau direktur hubungan pemerintah.

## 2. Media cetak

Media Cetak biasanya menerima sebuah *press release*, berita dengan foto, berita pers dengan diberi informasi latar belakang berita. Media penyiaran biasanya menerima skrip berita, rekaman wawancara, rilis berita video (VNR), atau berita pers yang memuat materi cocok untuk siaran.

## 3. Peristiwa atau acara (*events*)

Peristiwa yang layak diberitakan juga bisa menciptakan publisitas dengan menarik liputan media. Upacara peresmian, pemotongan pita, *open house*, reuni, acara penghargaan, iklan layanan di televisi, lomba lari maraton, pertemuan seremonial, pengangkatan guru besar, penandatanganan kontrak dan perjanjian, protes terorganisir, konferensi pers, dan “peristiwa media” lainnya adalah acara yang didesain menjadi “berita”. Misalnya, sebuah taman hiburan menjadi berita setelah pengunjung ke-500 juta masuk ke taman tersebut kru berita meliput dan menampilkan gambar presiden yang mendatangi undang-undang reformasi perawatan kesehatan dengan para pemimpin kesehatan berdiri di sebelah di salah satu ruangan Istana Negara. Orang-orang yang menampilkan dan mengelola peristiwa semacam itu bisa menarik perhatian media dan bisa mengontrol apa yang akan dilaporkan. Acara publisitas yang sukses mengandung nilai berita riil; menarik media massa; memberikan foto, video atau rekaman suara; dan mengkomunikasikan pesan yang dimaksud oleh nara sumber (Cutlip, 2000:12-13)

## 4. Media tradisional

Media Tradisional berupa pertunjukan tradisional, merupakan media komunikasi sosial tertua yang dikenal oleh masyarakat. Media tradisional yang dimaksud adalah bentuk-bentuk *folklore*, seperti cerita frosa rakyat (mitos, legenda, dongeng), ungkapan rakyat

(peribahasa, pantun, pemeo, dan lain-lain), puisi rakyat, nyanyian rakyat, teater/pertunjukan rakyat (ketoprak, ludruk, randai dan sebagainya) dan alat bunyi-bunyian (kentong, gong, beduk, genderang, dan sebagainya). Pertunjukan rakyat tradisional itu bisa lebih terkait dengan masyarakat pedesaan, baik sebagai media komunikasi atau sebagai media hiburan. Ditinjau dari latar belakang masyarakat Indonesia yang mayoritas masih diwarnai oleh suasana kehidupan pedesaan, maka dapat dimengerti mengapa media pertunjukan tradisional masih besar peranannya dalam komunikasi pembangunan. Bila pesan-pesan yang meliputi pendidikan, pertanian, kesehatan, koperasi, keluarga berencana, dan lain-lain diselipkan lewat media yang tidak asing dan dengan cara yang telah mereka kenal dan sesuai dengan nilai-nilai kultural, masyarakat tidak akan merasakan paksaan pesan penerangan tersebut. Kekuatan media tradisional terletak pada sifat yang merakyat (Rachmadi, 1992: 89).

Ada cara dalam mengkomunikasn program melalui pertunjukan budaya lokal salah satunya adalah teater. Program melalui pertunjukan budaya lokal teater tak lain adalah proses berbagi informasi dan pengetahuan. Informasi yang mampu memotivasi secara positif bagi penikmatnya. Informasi dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan semakin mampu membangun keberadaan (Ade Tanesia, 2007:26).

Untuk menjalankan programnya Humas Pemerintah perlu mendapatkan *Icon* sebagai perantara dalam mengkomunikasikan program melalui pertunjukan budaya lokal yaitu komunitas seni. Dalam pengertian komunitas, komunikasi yang terjadi bahkan mirip dengan komunikasi kelompok. Kelompok yang baik adalah kelompok yang dapat mengatur sirkulasi tatap muka intensif diantara mereka, sehingga mampu melahirkan sentimen-sentimen kelompok serta

kerinduan diantara mereka (Burhan Bungin, 2006:270).

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi (Rachmat, 2000: 24)

Tujuan penelitian deskriptif adalah:

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.
- c. Membantu perbandingan dan evaluasi.
- d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk mendapatkan rencana keputusan pada waktu yang akan datang.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta area kerja Humas Pemerintahan Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kenari 56 Yogyakarta 55165 dan area Sosrowijayan sebagai tempat dilaksanakan program melalui Pertunjukan Budaya Lokal melalui Komunitas Sejo Gurih.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan untuk penelitian akan dikumpulkan melalui tiga cara:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara. Menurut Esteborg (dalam Sugiono, 2009:231), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.

Wawancara bertujuan mendapatkan informasi secara langsung, mendalam dan detail dari nara sumber yang dibutuhkan penelitian ini melalui tanya jawab antara pewawancara dan informan dengan menggunakan *interview guide* atau panduan wawancara. *Interview guide* adalah sekumpulan pertanyaan yang digunakan agar wawancara yang dilakukan dapat terarah pada topik penelitian.

Adapun kriteria internal narasumber yang dipilih dalam penelitian ini untuk diwawancarai merupakan orang internal Humas Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengetahui banyak tentang informasi Program Kesehatan dan Anti-Korupsi sehingga data-data yang didapat menjadi sangat relevan adalah Humas Pemerintah Yogyakarta.

Peneliti juga menentukan kriteria informan dari eksternal Pemerintahan Kota Yogyakarta yaitu Komunitas Sejo Guruh sebagai salah satu aktor dari teater Sejo Guruh dalam mengkomunikasikan program secara langsung kepada masyarakat sehingga menguasai isi pesan dan dialog dari proses penyampaian program kepada masyarakat Yogyakarta yang menonton pertunjukan budaya lokal. Informan eksternal lainnya adalah masyarakat yang menonton pertunjukan budaya lokal melalui teater karena masyarakat dapat menilai langsung isi pesan dan cara dari mengkomunikasikan program-program yang diperankan Komunitas Sejo Guruh terkait target sasaran dalam

mengkomunikasikan Program Kesehatan dan Anti-Korupsi melalui pertunjukan budaya lokal.

b. Studi pustaka

Teknik studi pustaka akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu teknik dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai macam pustaka melalui referensi-referensi seperti buku, koran, bulletin, majalah, dokumen resmi maupun *booklet* yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini selain melalui wawancara dengan menggunakan data dari bahan tertulis seperti dokumen-dokumen administrasi, media buku pendukung, artikel, laporan hasil penelitian, dan brosur (Moleong, 2006:1).

#### **4. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini Analisis Data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis penelitian deskriptif menggunakan pengola data kualitatif, yaitu berupa uraian-uraian yang menjelaskan permasalahan, dalam pengolahan data tersebut tidak diperlukan data-data berupa angka. Hasil data dari penelitian kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan Patton (dalam Moleong 2006:103).

Langkah-langkah analisis data dari penelitian deskriptif, sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian seperti wawancara, mengumpulkan dokumen-dokumen berupa buku, majalah, literatur, dan sumber-sumber lain yang menjadi penunjang penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, mengkode data, menelusur tema dan membuat gugus-gugus.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyusunan, pengumpulan informasi ke dalam suatu matrik atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi semacam ini akan memungkinkan adanya adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan kesimpulan

Berangkat dari pengumpulan data, peneliti mencari makna dari data-data yang terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan penjelasan, kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam suatu informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data yang terkumpul disusun di dalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan masalah-masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu sama lain sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari sikap permasalahan yang ada.

**5. Uji validitas Data**

Uji validitas data pada penelitian ini mengambil Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2002:3). Cara yang digunakan dalam menguji keabsahan data yang diperoleh dengan teknik triangulasi sumber dapat dilakukan dengan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen berkait.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara yaitu membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara yang peneliti lakukan dan membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen berkaitan seperti dokumen administratif, artikel dan lain-lain agar hasil penelitian dapat akurat.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan penyajian hasil analisis data sekaligus memudahkan proses analisis penelitian. Untuk itu, tulisan ini disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab.

Bab pertama berisis tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori dan metode penelitian yang digunakan. Paparan pada bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang mengantarkan isi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua berisi tentang profil instansi tempat penelitian yaitu Humas Pemerintah Kota Yogyakarta. Isi dari profil terdiri dari sejarah atau profil instansi, visi dan misi, fungsi dan tugas, lokasi, struktur organisasi Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dan lain-lain.

Bab ketiga merupakan aktivitas Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengkomunikasikan Program Kesehatan dan Anti-Korupsi melalui pertunjukan budaya lokal. Bab ini terdiri dari hasil penelitian berupa wawancara serta dokumentasi kemudian menganalisis aktivitas humasnya. Paparan bab ini dianalisis melalui analisis kualitatif.

Bab empat merupakan kesimpulan sekaligus sebagai penutup skripsi. Kesimpulan didapat dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan pada bab tiga.